



## **Analisis Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Thailand dan Kamboja melalui Pendekatan *National Role Conception***

### ***Analysis of Indonesian Role in the Conflict Resolution of Thailand and Cambodia through the Approach of the National Role Conception***

**Rezky Ramadhan Antuli, Dudi Heryadi & Teuku Rezasyah**

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  
Universitas Padjadjaran, Indonesia

Diterima: 22 Juli 2019; Disetujui: 01 Desember 2019; Dipublish: 08 Desember 2019

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab konflik perbatasan yang melibatkan Thailand dan Kamboja dan peran Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik tersebut melalui pendekatan *National Role Conception*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka. Konflik berkepanjangan yang melibatkan Thailand dan kamboja banyak mendapatkan sorotan dunia Internasional. Banyak pihak yang ingin menjadi pihak ketiga sebagai mediator dalam konflik tersebut salah satunya Indonesia. Konflik yang melibatkan kedua negara ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, kepentingan nasional kedua negara, kedaulatan masing-masing negara, sejarah kuil preah vihear dan politik dalam negeri Thailand. Peran Indonesia dalam konflik ini yaitu bertindak sebagai mediator-integrator dengan melakukan upaya *shuttle diplomacy* sebagai konsep peran nasionalnya. Indonesia mendapatkan harapan dari pihak lain yaitu ASEAN dan PBB dalam upaya penyelesaian konflik dikarenakan posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN. Indonesia melakukan beberapa langkah dalam konflik ini dengan memfasilitasi berbagai macam pertemuan bilateral maupun multilateral sebagai bentuk nyata tindakan Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik.

**Kata Kunci:** Konflik, Konsepsi Peran Nasional, Penyelesaian Konflik

#### **Abstract**

*This study aims to determine the factors causing border conflicts involving Thailand and Cambodia and Indonesian role in efforts to resolve the conflict through the approach of the National Role Conception. This study uses qualitative methods with descriptive research types. Data collection is done by library research. The conflicting conflict involving Thailand and Cambodia has received a lot of international interest. Many actors who want to be third actor as mediator in the conflict, one of them is Indonesia. The conflict involving the two countries was caused by several factors among others, the national interests of the two countries, the sovereignty of each country, the history of the preah vihear temple and Thai domestic politics. Indonesia's role in this conflict was to act as integrators by making shuttle diplomacy as a concept of its national role. Indonesia gained hope from other actor, namely ASEAN and the United Nations in an effort to resolve the conflict due to Indonesia's position as chairman of ASEAN. Indonesia took several steps in this conflict by facilitating various kinds of bilateral and multilateral meetings as a concrete form of Indonesian action in efforts to conflicts resolution.*

**Keywords:** Conflict, National Role Conceptions, Dispute Settlement

**How to Cite:** Antuli, R.R., Heryadi, D. & Rezasyah, T. (2019). Analisis Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Thailand dan Kamboja Melalui Pendekatan National Role Conception. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11(2): 449-458

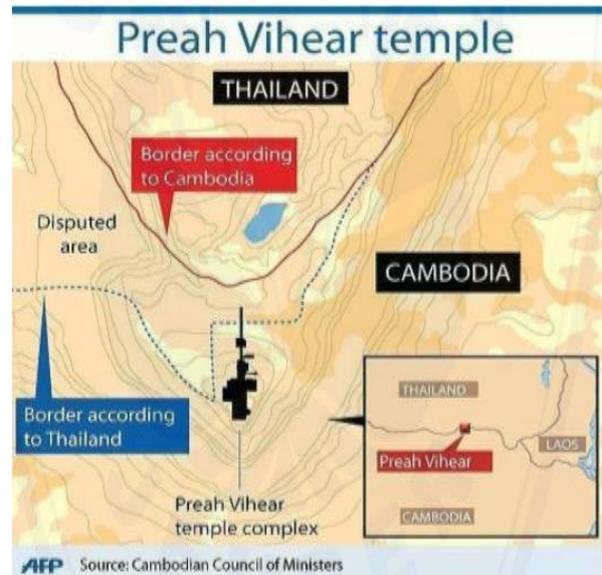


## PENDAHULUAN

Konflik Internasional muncul dikarenakan pertentangan antara tuntutan yang dimiliki negara A dengan kepentingan negara B atau negara lainnya. Konflik timbul diakibatkan cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk menyelesaikan masalah bertentangan dengan yang dikehendaki oleh negara lain. Terdapat beberapa isu tradisional penyebab konflik internasional yang salah satunya adalah masalah teritorial (Holsti, 1988).

Konflik yang terkait dengan masalah teritorial yang pernah terjadi adalah konflik perbatasan yang melibatkan dua negara yaitu Thailand dan Kamboja. Konflik kedua negara ini disebabkan oleh saling klaim kepemilikan situs bersejarah kuil Prear Vihear yang dibangun pada abad ke-11 (BBC, 2011).

Kuil Preah Vihear terletak di puncak pegunungan Dangrek yang memiliki ketinggian 657 meter di atas permukaan air laut dan berada tepat pada wilayah perbatasan Kabupaten Kantharak bagian timur laut Thailand dan Kabupaten Choam Khasant, Provinsi Preah Vihear bagian utara Kamboja (Cipto, 2007).



Gambar Peta Wilayah Kuil Preah Vihear  
Sumber : *Cambodian Council of Minister*

Kamboja kemudian pada tahun 1953 ketika merdeka mulai mengungkit persoalan kepemilikan kuil Preah Vihear dengan Thailand. Hal inilah yang menyebabkan ketegangan hubungan kedua negara. Thailand kemudian mengirimkan tentara ke lokasi kuil dan bahkan membawa beberapa arca dari kuil tersebut ke dalam negerinya.

Setelah menemui jalan buntu dalam proses diplomasi antar kedua negara, kedua belah pihak kemudian menyepakati untuk menyerahkan masalah ini ke Mahkamah Internasional. Hasil putusan Mahkamah Internasional pada tanggal 15 Juni 1962 memutuskan bahwa pemilik dari kuil Preah Vihear adalah pihak Kamboja dan selanjutnya pihak Thailand diharuskan untuk menarik kembali seluruh pasukan militernya maupun para

penjaga yang sebelumnya ditugaskan untuk menemani daerah sekitaran kuil yang merupakan wilayah kedaulatan Kamboja (Mangku, 2011).

Pasca Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kuil tersebut milik kamboja tahun 1962, ketegangan antar kedua negara pun mereda dan masalah terkait kuil Preah Vihear pun hampir tidak pernah di angkat lagi oleh kedua belah pihak selama beberapa dekade. Kemudian ketegangan yang berkaitan dengan masalah perbatasan di dekat kuil Preah Vihear muncul kembali pada tahun 2008 sampai 2011 setelah kedua negara lebih dari 46 tahun berada dalam situasi yang damai. Ketegangan ini pun bahkan sampai melibatkan militer kedua negara (Raharjo, 2013).

Meningkatnya kembali ketegangan hubungan kedua negara ini dipicu oleh pengakuan UNESCO atas kuil Preah Vihear sebagai situs warisan dunia atas permintaan Kamboja. Kemudian Kamboja juga mengajukan kepada ICJ agar area seluas 4,6 km<sup>2</sup> dimasukkan juga kedalam wilayahnya. Hal tersebut belum mendapatkan tanggapan dari pihak ICJ dan membuat Thailand menggugat keputusan tersebut karena menganggap putusan Mahkamah Internasional tentang *Case Concerning the Temple of Preah Vihear*

tahun 1962 perlu dilakukan tinjauan kembali (Sindo News, 2016).

Pada tahun 2008 Kamboja menangkap tiga orang demonstran Thailand karena berusaha mencapai kuil dengan cara melompati pagar kawat berduri. Hal inilah kemudian yang membuat kedua negara melakukan penggelaran ratusan militer di area sekitaran kuil. Kemudian setelah insiden tersebut pada Agustus 2008 untuk pertama kalinya kedua pasukan militer terlibat kontak senjata secara langsung dan melukai seorang militer negara Kamboja. Pertempuran ini kemudian berlanjut pada bulan Oktober 2008 dimana merenggut tiga nyawa tentara kamboja dan seorang tentara Thailand (Antara News, 2009).

Sengketa Kuil Preah Vihear memunculkan ketegangan bahkan hingga ke konflik bersenjata yang melibatkan militer kedua negara. Konflik inilah yang kemudian membuat hubungan diplomatik kedua negara menjadi tidak baik. Kondisi ketegangan antara kedua negara mengalami pasang surut yang pada akhirnya pada tahun 2011 konflik ini pun tak terhindari dimana terjadinya beberapa kali baku tembak antara militer Thailand dan Kamboja yang menewaskan banyak orang dan membuat kurang lebih 85.000

warga kedua negara mengungsi (Raharjo, 2013).

Memandang semakin tingginya eskalasi konflik tersebut, kedua negara seakan tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini secara bilateral. Dengan melihat kondisi hubungan kedua negara yang semakin memburuk pada akhirnya memunculkan aktor atau pihak lain untuk bertindak sebagai mediator yang salah satunya adalah Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu entitas dalam sistem internasional yang sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945, melalui politik luar negerinya yang Bebas-Aktif Indonesia secara berkelanjutan memberikan kontribusi positif dalam penyelesaian konflik-konflik internasional.

Indonesia juga secara aktif mendorong tercapainya penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja. Pada 14 Februari 2011, Indonesia sukses menjadi mediator konflik di saat Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mampu mendamaikan kedua negara di PBB. Kemudian pada 22 Februari 2011, Indonesia pun sukses mendamaikan masalah sengketa wilayah Thailand dan Kamboja ketika diadakannya pertemuan para menteri luar negeri se-Asean di Jakarta yang membahas masalah sengketa tersebut (Detik News, 2011).

Berdasarkan hal di atas maka dalam artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik antara Thailand dan Kamboja melalui pendekatan *National Role Conception*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini dianggap lebih memungkinkan peneliti untuk mengungkap sebuah realitas di balik fenomena yang di angkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik antara Thailand dan Kamboja melalui pendekatan *National Role Conception*. Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan dilakukan dengan cara penelusuran studi pustaka, dokumen berbentuk press release yang dikeluarkan oleh pemerintah, berita dan media online yang terkait dengan isu penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-Faktor Penyebab Konflik Thailand dan Kamboja**

Terdapat empat faktor utama yang menjadi akar permasalahan konflik berkepanjangan yang melibatkan Thailand dan Kamboja. Faktor-faktor tersebut diantaranya Pertama, kepentingan nasional kedua negara. Kuil Preah Vihear

tidak dapat dipungkiri memiliki nilai yang sangat strategis. Kedua negara mempunyai cara pandang yang sama tentang kuil tersebut selain merupakan sebuah kehormatan mempunyai situs peninggalan dunia, kuil juga sangat bermanfaat dari segi pendapatan ekonomi. Thailand dan Kamboja merupakan dua negara di Asia Tenggara yang yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai salah satu pendapatan keuangan negara. Kedua semakin memiliki niat yang kuat untuk memiliki kuil ini pasca ditetapkannya oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia pada tahun 8 Juli 2008. Hal tersebut tentunya akan mengundang banyak turis atau wisatawan lokal ataupun asing untuk datang ke tempat tersebut.

Kedua adalah faktor kedaulatan negara. Masing-masing pihak mengklaim kuil ini dikarenakan belum diselesaikannya garis batas kedua negara diwilayah sengketa. Berkaitan dengan kedaulatan sebuah negara memang bukan menjadi perkara yang mudah untuk melakukan sebuah negosiasi apalagi ketika menyangkut kepentingan umum. Kedua negara baik Thailand dan Kamboja mempunyai cara dan tujuan tersendiri untuk melindungi negara dan rakyatnya. Kedua pihak dalam konflik ini mempunyai *sense of belonging* atau rasa kepemilikan yang kuat untuk kuil tersebut sehingga merupakan sebuah hal yang wajar apabila

kedua negara saling gigih untuk bisa memasukan kuil ataupun area seluas 4,6 km<sup>2</sup> disekitaran kuil kedalam wilayah kedaulatan masing-masing negara.

Ketiga faktor historis kuil Preah Vihear. Kuil Preah Vihear berdasarkan catatan sejarah di bangun pada ke-11 oleh seorang Raja Khmer yang saat ini Kamboja. Atas dasar inilah kemudian pemerintah Kamboja memberikan sebuah penafsiran apabila kuil ini di bangun oleh seorang raja Kamboja maka begitupun dengan area sekitaran kuil tersebut yang merupakan wilayah kedaulatan Kamboja (Sindo News, 2008). Argumen ini juga dikuatkan oleh sebuah peta yang dibuat oleh kolonial Perancis dengan Thailand. Kedua bukti inilah kemudian oleh pemerintah Kamboja cukup untuk membenarkan bahwa kuil tersebut adalah milik negaranya, apalagi pemerintah Kamboja dalam waktu yang lama telah melakukan pemeliharaan dan pemugaran diarea kuil tersebut.

Pihak Thailand sendiri memiliki argumen tersendiri untuk mengklaim bahwa kuil tersebut adalah milik negaranya. Thailand membantah bahwa menurut tradisi mereka, masyarakat Thailand yang telah lama mendiami area sekitaran kuil tersebut dan melakukan peribadatan di kuil tersebut. Thailand juga memperkuat argumennya dengan memperlihatkan kuil tersebut berada

dalam wilayahnya pada peta yang dibuat tahun 1904 (Internasional Okezone, 2008).

Keempat, politik dalam negeri Thailand. Kegaduhan politik yang terjadi di dalam negeri Thailand tidak hanya memiliki dampak di dalam domestic saja melainkan juga berpengaruh terhadap hubungan bilateral Thailand dan Kamboja. Hal tersebut dikarenakan oleh dukungan pemerintah Thailand terhadap Kamboja atas kepemilikan kuil Preah Vihear yang pada waktu itu juga masih dalam status sengketa. Namun beberapa pihak menilai bahwa kebijakan ini tidak mengakomodasi kepentingan kelompok lain yang ada di Thailand.

Momentum inilah yang kemudian dimanfaatkan kelompok PAD (People's Alliance For Democracy) untuk menjatuhkan pemerintahan yang sedang berjalan. Demi untuk menjatuhkan kekuasaan Samak Sundaravej yang merupakan sekutunya Thaksin, kelompok PAD yang juga didukung pihak oposisi yakni Partai Demokrat memanfaatkan betul momentum tersebut.

Kelompok PAD, mengkampanyakan slogan *khai chat* yang berarti menjual bangsa atau negara kepada pihak asing pada isu tersebut sebagai alat propaganda politik dalam memperoleh simpati dari rakyat Thailand. Mereka menuduh Pemerintahan Perdana Menteri Samak

Sundaravej dan sosok Thaksin yang berada dibelakangnya ingin mengorbankan wilayah seluas 4,6 kilometer persegi yang mengelilingi kuil itu kepada Kamboja demi kepentingan pribadi mereka semata. Hal inilah yang kemudian berimplikasi terhadap kebijakan luar negeri Thailand ke Kamboja sehingga berdampak pada pola hubungan bilateral kedua negara (Chachavalpongpon, 2011).

### **Peran Indonesia dalam penyelesaian Konflik**

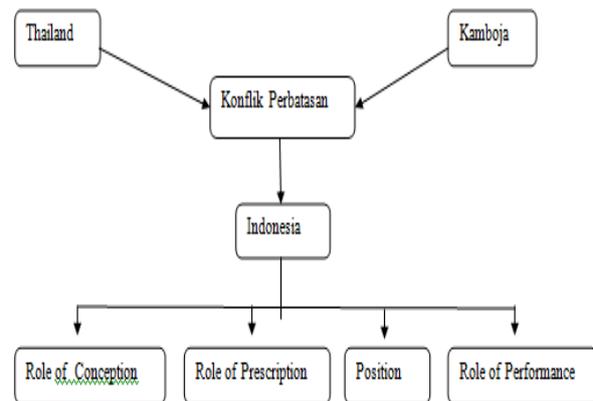
Peran Indonesia dapat di lihat dalam empat konsep berdasarkan *national role conception* yang dikenalkan oleh Holsti. Peran nasional didefinisikan sebagai suatu *out put* kebijakan luar negeri yang hanya dihubungkan dengan negara-negara yang terlibat dalam masalah-masalah yang ada dalam sebuah sistem dan kawasan. Terdapat banyak negara kecil seperti Lesotho dan kepulauan Maldives yang meskipun menyatakan atau menunjukkan minat terhadap negara lain namun tidak dapat terlihat bahwa mereka dapat memainkan peranan yang nyata dalam percaturan dunia internasional. Dapat disimpulkan bahwa suatu konsepsi peran nasional yang tipikal merupakan pembela kawasan regional, suatu peran yang melindungi negara lain di suatu wilayah tertentu atau menjadi mediator dan suatu

peran yang membantu memecahkan konflik internasional (Hosti, 1988).

Konsepsi peran nasional ini muncul berdasarkan perkembangan penyebutan oleh para pengkaji Hubungan Internasional terhadap perilaku negara. Kecenderungan para pengkaji HI pada saat itu hanya menyebut negara dengan identitas perilakunya dalam suatu interaksi internasional namun tidak menelaah lebih dalam terkait dengan pandangan negara tersebut. Contohnya terdapat beberapa negara yang disebut sebagai negara Blok Timur, Blok Barat, atau Non Blok (negara yang tidak berafiliasi dengan kedua blok tersebut). Selanjutnya di dalam blok-blok tersebut negara juga diklasifikasikan lagi sebagai penyeimbang, pemimpin blok atau hanya sebagai negara pinggiran (Holsti, 1970).

Menganalisis peran apa saja yang dimiliki oleh negara dalam sistem internasional, Holsti (1970) melakukan serangkaian penelitian. Dalam penelitian tersebut Holsti menyatakan bahwa perilaku negara ditentukan oleh konsepsi peran nasional, posisi atau status negara dalam sistem internasional selanjutnya tuntutan dan harapan peran dari negara lain. Lebih lanjut Holsti memperkenalkan empat konsep peran yaitu *National Role Conceptions*, *Position*, *National Role Prescription*, dan *Role Performances*.

Berkaitan dengan hal tersebut konsepsi peran nasional Indonesia dalam konflik yang melibatkan Thailand dan Kamboja dapat digambarkan sebagai berikut :



Peran Indonesia berdasarkan *role of conception* dalam menyelesaikan konflik antara Thailand dan Kamboja Indonesia yaitu bertindak sebagai Mediator-Integrator dalam konsep peran nasional. *Role of Conception* merupakan kepribadian atau ide serta pemikiran sebuah negara untuk bertindak sebagai mediator dalam konflik.

Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa melakukan upaya “shuttle diplomacy” dengan bertemu pemerintah kedua negara yang diwakili oleh masing-masing menteri luar negerinya.. Kamboja diwakili oleh yaitu Hor Nam Hong di Phnom Penh dan Thailand diwakili oleh Kasit Piromya di Bangkok. Tujuan pertemuan ini adalah pemerintah Indonesia ingin secara langsung mendapatkan informasi

mengenai konflik tersebut dari pihak pertama (Kompas, 2011).

Holsti (1970) menjelaskan bahwa Mediator-Integrator merupakan sejumlah negara yang memandang dirinya sanggup atau bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas khusus sebagai perantara untuk mendamaikan negara atau kelompok negara tertentu. Mereka memandang dirinya sebagai regional atau global *fixers*.

Memandang Indonesia juga merupakan ketua ASEAN pada saat itu, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk bertindak sebagai mediator konflik antara Thailand dan Kamboja. Tindakan atau upaya yang dilakukan oleh Indonesia adalah lebih kepada upaya diplomasi. Indonesia melakukan berbagai macam perundingan- perundingan dengan kedua belah pihak baik Thailand maupun Kamboja. Hal tersebut dapat dilihat pada bulan Februari 2011 ketika diadakannya pertemuan informal para Menteri Luar Negeri negara ASEAN. Pada pertemuan tersebut menghasilkan poin bahwa kedua negara menyepakati keterlibatan Indonesia dalam menyelesaikan konflik sengketa wilayah disekitar Kuil Preah Vihear dan juga menunjuk Indonesia menjadi peninjau konflik kedua negara yang bersengketa (Andriani, 2018).

Peran Indonesia sangat dibutuhkan oleh negara-negara kawasan ASEAN untuk menyelesaikan konflik Thailand dan Kamboja ASEAN mengingat konflik ini dapat mengganggu stabilitas keamanan oleh negara-negara ASEAN. Indonesia telah melakukan berbagai upaya agar kedua pihak dapat menyelesaikan konflik ini dengan cara-cara yang sifatnya diplomatis tanpa adanya pendekatan militer dan konflik ini tidak perlu di bawa hingga ke ranah Internasional seperti Dewan Keamanan PBB. Indonesia dalam konflik ini banyak mendapat kepercayaan dari DK-PBB untuk menyelesaikannya.

Harapan dari ASEAN dan PBB untuk Indonesia dalam ini di sebut sebagai *role prescription*. *Role prescription* adalah saran atau tuntutan tindakan dari sistem internasional (lingkungan eksternal) terhadap suatu negara.

Hal ini kemudian selaras dengan yang dialami Indonesia dengan mendapatkan masukan dan kepercayaan dari pihak lain dalam hal ini negara ataupun organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik antara Thailand dan Kamboja. Sorotan peran Indonesia bukan hanya datang dari kawasan ASEAN saja melainkan hingga ke negara- negara PBB.

Indonesia dalam upaya mediasinya juga mendapatkan dukungan dari negara Amerika Serikat (AS) untuk menyelesaikan

konflik yang berkepanjangan antara militer Thailand dengan Kamboja di perbatasan kedua negara dan memintakan agar kedua belah pihak saling menahan diri. Pemerintah Amerika Serikat (AS) menegaskan dukungan untuk Indonesia yang saat ini merupakan ketua ASEAN untuk membantu upaya penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja (Berita Satu, 2011).

Ketiga adalah konsep *position*. *Position* dalam hal ini merupakan posisi suatu negara dalam sistem internasional yang membuatnya diharapkan dapat mengambil tindakan tertentu sesuai dengan posisi tersebut.

Posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN sangat dipuji oleh beberapa kalangan baik di antara negara-negara kawasan ASEAN maupun di kancah Internasional. Suksesnya Indonesia memainkan peran sebagai mediator-integrator dalam konflik Thailand dan Kamboja tercapai ketika Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mampu mendamaikan kedua negara di PBB pada 14 Februari 2011.

Indonesia sangat diperhitungkan posisinya dalam kawasan Internasional. Beberapa kali Indonesia mampu menjadi aktor untuk menyelesaikan konflik-konflik internasional khususnya konflik yang terjadi dikawasan. Misalnya pada tahun

1988-1989 Indonesia pernah menjadi tuan rumah Jakarta Informal Meeting (JIM) untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Dalam pertemuan ini Indonesia berhasil memfasilitasi dan memediasi kedua negara yang sedang berkonflik untuk bisa duduk bersama-sama dan mendiskusikan terkait penyelesaian konflik diantara kedua negara. Dengan adanya pertemuan atas inisiasi Indonesia inilah keadaan di Kamboja berangsur damai dan aman ketika Vietnam menarik pasukannya dari negara tersebut (Kompas, 2011). Hal inilah yang menjadikan Indonesia disoroti oleh pihak lain dapat memainkan kembali peranannya dalam menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Thailand.

Konsep terakhir yaitu *role performance*. *Role performance* adalah perilaku umum kebijakan luar negeri sebuah negara. Hal tersebut termasuk pola sikap, keputusan, tanggapan, fungsi dan komitmen terhadap negara lain.

Bentuk tindakan nyata Indonesia sebagai dalam menjalankan peranannya menyelesaikan konflik antara Thailand dan Kamboja dapat terlihat jelas ketika Indonesia menyelenggarakan berbagai pertemuan dan memfasilitasi pertemuan tersebut secara bilateral maupun multilateral yang diantaranya : Pertama, mengadakan pertemuan informal kedua

negara di Jakarta. Kedua melakukan pertemuan dalam kerangka Joint Border Committee (JBC) di Bogor. Ketiga, mengadakan pertemuan Trilateral disela-sela KTT ASEAN ke-18 di Jakarta, dan terakhir mengadakan pertemuan formal Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM).

Forum Joint Border Commission dan ASEAN Foreign Ministers Meeting yang dilaksanakan di Bogor pada April 2011 yang difasilitasi Indonesia selaku ketua ASEAN melahirkan solusi berupa pengiriman tim pemantau ke area sengketa, namun, solusi yang ditawarkan tersebut belum disepakati oleh kedua pihak yang berkonflik. Upaya yang dilakukan ASEAN tersebut kemudian mendapatkan titik terang pada saat Mahkamah Internasional memutuskan agar kedua negara menarik semua pasukan militernya dan mengizinkan tim pemantau dari ASEAN untuk memasuki zona demiliterisasi.

Pada Desember 2011 Thailand dan Kamboja menyepakati untuk menarik mundur pasukan mereka di bawah pengawasan tim pemantau dari Indonesia. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai simbol meredanya konflik diantara kedua negara (Raharjo, 2013). Kehadiran Indonesia memang sejak awal dalam memediasi konflik tersebut justru atas

permintaan dan undangan kedua Negara yang bersengketa.

## SIMPULAN

Konflik yang melibatkan Thailand dan Kamboja diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu kepentingan nasional kedua negara, kedaulatan masing-masing negara, sejarah kuil preah vihear, dan terakhir politik dalam negeri Thailand. Selanjutnya upaya yang kemudian dilakukan oleh Indonesia sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui upaya yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang lebih diplomatis. Harapan untuk Indonesia dalam menjadi mediator muncul dari ASEAN dan PBB. Konsepsi peran yang dilakukan Indonesia adalah dengan menggunakan "*shuttle diplomacy*". Posisi Indonesia dikawasan Dan juga menjadi ketua ASEAN juga menjadi modal tersendiri untuk mempermudah jalannya mediasi. Indonesia juga telah melakukan tindakan nyata yang dalam konsep peran nasional disebut dengan *role of performance* dengan memfasilitasi berbagai macam pertemuan seperti ASEAN *Foreign Minister's Meeting* dengan agenda tunggal pembahasan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja dan Pertemuan dalam kerangka Joint Border Committee (JBC) di Bogor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R. (2018). Efektifitas ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Thailand Dan Kamboja. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, 16(2), 81-164.
- Antara News, 3 April 2009. Kronologi Konflik Thailand-Kamboja. Diakses melalui [https://www.antaraneews.com/berita/136978/kronologi-konflik-thailand-kamboja-pada-29 Mrt 2019](https://www.antaraneews.com/berita/136978/kronologi-konflik-thailand-kamboja-pada-29-Mrt-2019).
- Berita Satu 26 April 2011. Indonesia Didukung AS Selesaikan Konflik Thailand-Kamboja. Diakses melalui [https://id.beritasatu.com/home/indonesia-didukung-as-selesaikan-konflik-thailand-kamboja/10499 pada 29 Maret 2019](https://id.beritasatu.com/home/indonesia-didukung-as-selesaikan-konflik-thailand-kamboja/10499-pada-29-Maret-2019).
- Cipto, B. (2007). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Teropong Terhadap, Realitas, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chachavalpongpon, P. (2011). The necessity of enemies in Thailand troubled politics The Making of Political Otherness). *Asian Survey*, 51 (6), 1019-1041.
- Detik News, 24 Februari 2011, Apa Hebatnya Diplomasi Indonesia dalam Konflik Thailand Kamboja?. Diakses melalui [https://news.detik.com/opini/d-1578623/apa-hebatnya-diplomasi-indonesia-dalam-konflik-thailand-kamboja-pada 29 Maret 2019](https://news.detik.com/opini/d-1578623/apa-hebatnya-diplomasi-indonesia-dalam-konflik-thailand-kamboja-pada-29-Maret-2019).
- Holsti, J.K. (1970). National Role Conceptions in the of Foreign Policy. *International Studies*. 14(3), 233-309.
- Holsti, J.K. (1988). *Politik Internasional: Kerangka Analisis* Jilid I. Jakarta: Erlangga.
- Internasional Sindo News, 15 April 2013, Berebut Preah Vihear, Thailand dan kamboja di Mahkamah Internasional di akses melalui [https://international.sindonews.com/read/738329/40/berebut-candi-preah-vihear-thailand kamboja-bertarung-di-mahkamah-internasional-1366027071](https://international.sindonews.com/read/738329/40/berebut-candi-preah-vihear-thailand-kamboja-bertarung-di-mahkamah-internasional-1366027071), pada 29 Maret 2019.
- Kompas, 22 Februari 2011, Penyelesaian Konflik Kamboja di akses Melalui <https://internasional.kompas.com/read/2011/02/22/17270840/Penvelesaian.Konflik.Thailand.Kamboja?page=2>. Pada 29 Maret 2019.
- Mangku, D. (2011). Peluang dan Tantangan Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Vihear di Perbatasan Kamboja dan. *Pandecta*, 6(2), 107-116.
- Raharjo, S. (2013). Tantangan Konflik Thailand-Kamboja Bagi Stabilitas. *Jurnal Kajian Wilayah*, 4(1), 106-121.